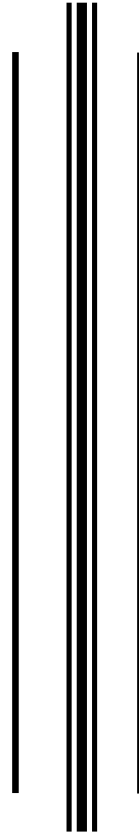




**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 154 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 154 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepat Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.055.202.300.000,00 (satu triliun lima puluh lima miliar dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp58.344.885.400,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.869.101.000,00 (empatbelas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.086.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.901.479.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.929.219.400,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilanbelas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel Rp131.742.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.124.018.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta delapanbelas ribu rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp19.226.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp107.391.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp6.568.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp2.363.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.900.630.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.367.930.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.209.233.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
 - a. retribusi Jasa Umum Rp533.578.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - b. retribusi Jasa Usaha Rp65.333.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp46.175.000,00 (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
 - a. jasa Giro Rp2.335.251.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. pendapatan Bunga Rp4.741.615.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - c. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.217.099.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp528.205.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - e. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp108.127.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. pendapatan dari Pengembalian Rp851.163.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - g. pendapatan BLUD Rp13.244.555.000,00 (tigabelas miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - h. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.903.204.400,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp994.379.414.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.894.567.600,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.484.847.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus

delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. dana Perimbangan Rp872.598.060.800,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp278.036.482.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp407.503.851.000,00 (empat ratus tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp119.489.057.000,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp67.568.670.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. dana Insentif Daerah (DID) Rp12.575.702.800,00 (duabelas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
 - c. dana Desa Rp51.720.804.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp9.567.031.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp7.961.488.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp30.399.358.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d. pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp40.030.000,00 (empat puluh juta tiga puluh ribu rupiah); dan
 - e. pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.516.940.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.478.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh

delapan juta rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.065.202.300.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp687.921.545.419,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilanbelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.956.213.526,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tigabelas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.846.853.050,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.507.278.843,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.611.200.000,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara Rp184.658.905.214,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu dua ratus empatbelas rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Sipil Negara Rp102.248.909.890,00 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparat Sipil Negara Rp37.803.257.752,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp5.931.190.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp162.754.107,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh rupiah).
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp510.480.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai BOS Rp340.716.563,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enambelas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
- a. Belanja Barang Rp63.350.190.992,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp145.227.989.036,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp19.252.226.723,00 (sembilanbelas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp73.395.008.939,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Rp2.966.781.790,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp12.210.100.570,00 (duabelas miliar dua ratus sepuluh juta seratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rp12.444.555.000,00 (duabelas miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp24.983.846.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri dari:

- a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- c. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp262.174.109.181,00 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.320.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.921.771.692,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.570.630.465,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.871.688.950,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp490.018.074,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapanbelas ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja Modal Tanah Persil Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja Modal Lapangan Rp3.330.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja Modal Alat Besar Rp53.230.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. belanja Modal Alat Angkutan Rp9.756.500.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- c. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp467.255.884,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - d. belanja Modal Alat Pertanian Rp527.750.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp6.059.649.275,00 (enam miliar lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.336.308.900,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - g. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp24.450.775.810,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - h. belanja Modal Alat Laboratorium Rp148.578.200,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - i. belanja Modal Komputer Rp8.668.218.830,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - l. belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.070.480.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - m. belanja Modal Peralatan Olahraga Rp215.000.000,00 (dua ratus limabelas juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp3.517.524.793,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - o. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri dari:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung Rp52.938.630.465,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.632.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri dari:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp106.944.683.950,00 (seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- b. belanja Modal Bangunan Air Rp13.559.865.000,00 (tigabelas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja Modal Instalasi Rp15.586.060.000,00 (limabelas miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja Modal Jaringan Rp7.781.080.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri dari:
belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp114.606.645.400,00 (seratus empat belas miliar enam ratus enam juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.377.665.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.228.980.400,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari :
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp1.314.875.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp62.790.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan bantuan keuangan ke pemerintah desa.

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Besaran Alokasi Bantuan Keuangan yang diterima SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

- program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI NATUNA,



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 239

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.344.885.400,00
4.1.01.	Pajak Daerah	14.869.101.000,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	131.742.000,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	131.742.000,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	131.742.000,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.124.018.000,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.124.018.000,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.124.018.000,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	19.226.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.197.000,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.197.000,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	752.000,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	752.000,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.277.000,00
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.277.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	107.391.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.137.000,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.137.000,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	18.971.000,00
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	18.971.000,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.063.000,00
4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.063.000,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.220.000,00
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	2.220.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.000.000.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000.000,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	6.568.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	6.568.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	6.568.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	2.363.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	2.363.000,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	2.363.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.900.630.000,00
4.1.01.14.05.	Pajak Batu Apung	5.960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	5.960.000,00
4.1.01.14.12.	Pajak Granit/Andesit	129.851.000,00
4.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit	129.851.000,00
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	167.583.000,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	167.583.000,00
4.1.01.14.24.	Pajak Pasir Kuarsa	2.000.000.000,00
4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	2.000.000.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	597.236.000,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	597.236.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.367.930.000,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	1.367.930.000,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.367.930.000,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.209.233.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	382.560.000,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	382.560.000,00
4.1.01.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	826.673.000,00
4.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	826.673.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	645.086.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	533.578.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	402.036.000,00
4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	402.036.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	93.776.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	93.776.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.417.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.417.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.349.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	22.349.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	65.333.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	65.333.000,00
4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	65.333.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	46.175.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	46.175.000,00
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	46.175.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.901.479.000,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.901.479.000,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.901.479.000,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.901.479.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	31.929.219.400,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.335.251.000,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.335.251.000,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.335.251.000,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	4.741.615.000,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.741.615.000,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.741.615.000,00
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.217.099.000,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.217.099.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.217.099.000,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	528.205.000,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	528.205.000,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	528.205.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	108.127.000,00
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.287.000,00
4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.287.000,00
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.224.000,00
4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.224.000,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.440.000,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.440.000,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	99.241.000,00
4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	99.241.000,00
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.935.000,00
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	4.935.000,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	851.163.000,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	851.163.000,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	851.163.000,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	13.244.555.000,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	13.244.555.000,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	13.244.555.000,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.903.204.400,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.903.204.400,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.903.204.400,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	994.379.414.600,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936.894.567.600,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	872.598.060.800,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	278.036.482.800,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	50.874.746.000,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	10.641.908.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	644.758.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.957.736,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	60.398.696.064,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	146.357.729.000,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	867.920.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.774.000,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.219.994.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.503.851.000,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	407.503.851.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	119.489.057.000,00
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	666.252.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.919.089.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.031.903.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	34.883.493.000,00
4.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	19.148.122.000,00
4.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.000.001.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	42.079.437.000,00
4.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.783.268.000,00
4.2.01.01.03.0049.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	977.492.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.568.670.000,00
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.601.860.000,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	955.000.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.790.771.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.171.750.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.228.779.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.350.440.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	344.590.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.695.127.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.327.040.000,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	4.369.370.000,00
4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.083.368.000,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.650.575.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	12.575.702.800,00
4.2.01.02.01.	DID	12.575.702.800,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	12.575.702.800,00
4.2.01.05.	Dana Desa	51.720.804.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	51.720.804.000,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	51.720.804.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.484.847.000,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	57.484.847.000,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.484.847.000,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.567.031.000,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.961.488.000,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.399.358.000,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	40.030.000,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.516.940.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.478.000.000,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.478.000.000,00
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.478.000.000,00
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.478.000.000,00
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.478.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	687.921.545.419,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	331.956.213.526,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	184.658.905.214,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	134.248.930.429,55
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	129.394.515.429,55
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.854.415.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.924.537.848,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.613.000.806,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	311.537.042,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.175.217.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.175.217.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.326.836.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.033.796.000,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	293.040.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.444.114.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.426.754.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	17.360.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.989.209.420,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.688.449.160,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	300.760.260,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	208.368.673,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	208.368.673,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.315.805,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.048.150,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.267.655,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.476.353.869,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.226.034.022,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	250.319.847,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	311.733.392,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	301.218.895,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.514.497,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	897.512.318,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	865.970.171,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	31.542.147,00
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	650.776.459,45
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	650.776.459,45
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.248.909.890,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.950.135.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.470.869.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	479.266.000,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.935.414.000,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.646.893.000,00
5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	288.521.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.331.482.550,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.241.234.550,00
5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	90.248.000,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.536.854.000,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.536.854.000,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	62.495.024.340,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	60.634.174.340,00
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.860.850.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.803.257.752,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.790.771.000,00
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	20.790.771.000,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.228.779.000,00
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	1.228.779.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.171.750.000,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.171.750.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.000.253.541,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.000.253.541,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	12.062.014.211,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.866.574.211,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	88.040.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	107.400.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	549.690.000,00
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	26.700.000,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	522.990.000,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.931.190.000,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.600.000,00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.600.000,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.800.000,00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.800.000,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	39.000.000,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	39.000.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	564.000.000,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	564.000.000,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.600.000,00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.600.000,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	152.400.000,00
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.000.000,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	100.200.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.524.500.000,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.524.500.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.754.107,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	105.934.107,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	105.934.107,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.000.000,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.000.000,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.820.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.820.000,00
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.000.000,00
5.1.01.05.11.0001.	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.480.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.600.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.600.000,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	340.716.563,00
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	340.716.563,00
5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	340.716.563,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.846.853.050,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	63.350.190.992,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	63.320.190.992,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	236.500.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.862.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.104.421.992,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.800.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.787.434.756,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.895.081.288,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	217.300.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.977.952.742,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.743.750,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.814.766.360,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	844.886.557,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	18.500.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.000.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	720.050.840,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	830.449.658,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	121.250.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	77.350.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.800.383.240,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.615.960.400,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.501.897.200,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	52.350.000,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	71.422.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.845.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.893.713.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.110.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.095.655.000,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.250.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.519.652.948,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.000.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.400.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	209.480.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	213.250.000,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.600.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	205.100.000,00
5.1.02.01.01.0072.	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	9.600.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	388.965.261,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	120.832.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	217.000.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	478.875.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.000.000,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	10.000.000,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	20.000.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	145.227.989.036,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	119.611.411.668,00
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.128.670.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.795.630.000,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.988.840.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44.400.000,00
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.132.500,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	193.325.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	478.400.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.255.400.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.474.074.699,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.785.000,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.022.000.000,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	369.828.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.047.571.581,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.535.600.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.431.462.200,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.741.600.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	344.850.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	697.500.000,00
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	269.311.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.700.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.227.600.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	57.310.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.541.522.098,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	6.670.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	33.200.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	605.800.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.500.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	188.500.000,00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.080.000.000,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	11.500.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.321.248.000,00
5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal	503.000.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	197.180.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	836.699.132,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	6.952.558.764,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	330.737.610,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.477.347.760,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	838.044.824,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	816.413.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.755.231.110,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.036.870.000,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	517.221.600,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.528.747.791,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	382.829.472,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	289.562.247,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	200.000.000,00
5.1.02.02.03.0007.	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.822.315.948,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	290.508.173,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.550.000,00
5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.675.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	174.521.000,00
5.1.02.02.04.0044.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0047.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.790.000,00
5.1.02.02.04.0048.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.056.110.000,00
5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	31.900.000,00
5.1.02.02.04.0090.	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	26.400.000,00
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.211.503.875,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	227.000.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	452.679.900,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	29.500.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	142.600.000,00
5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	28.878.000,00
5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	42.100.000,00
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	4.100.000,00
5.1.02.02.04.0444.	Belanja Sewa Suara	9.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.660.528.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	460.150.000,00
5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	310.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	427.750.000,00
5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.000.000,00
5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.200.000,00
5.1.02.02.05.0025.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	218.200.000,00
5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	210.000.000,00
5.1.02.02.05.0039.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	32.424.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	517.204.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	272.800.000,00
5.1.02.02.05.0046.	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	154.800.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	108.000.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	38.000.000,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	70.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.270.000.000,00
5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	70.000.000,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	770.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.085.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	585.000.000,00
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.910.000.000,00
5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	280.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	550.000.000,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	500.000.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	135.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.115.502.310,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.126.382.310,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	259.850.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	303.600.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	425.670.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	19.252.226.723,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	215.000.000,00
5.1.02.03.01.0025.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	115.000.000,00
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.268.974.083,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.465.168.090,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	364.080.000,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.500.000,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.606.450.890,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	24.000.000,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	364.800.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.229.650.000,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	500.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	32.080.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	174.500.000,00
5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	115.059.346,00
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	18.486.317,00
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	11.336.000,00
5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.081.000.000,00
5.1.02.03.02.0232.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	46.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.260.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	59.800.000,00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	27.303.440,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	35.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	410.000.000,00
5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	73.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.566.926.640,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.910.661.200,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.700.000.000,00
5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.379.000.000,00
5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	197.000.000,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	314.380.000,00
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	243.639.500,00
5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	40.000.000,00
5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	751.745.940,00
5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	735.000.000,00
5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	225.500.000,00
5.1.02.03.03.0052.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	60.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.326.000,00
5.1.02.03.04.0029.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	78.826.000,00
5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	74.500.000,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	20.000.000,00
5.1.02.03.05.0065.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	10.000.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	73.395.008.939,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.311.566.629,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.849.011.453,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.548.062.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	810.238.176,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.255.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	83.442.310,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	83.442.310,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.966.781.790,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.302.631.790,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	328.631.790,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.000.000,00
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	665.000.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.664.150.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.235.800.000,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	428.350.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.210.100.570,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.210.100.570,00
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.210.100.570,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.444.555.000,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.444.555.000,00
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.444.555.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	25.507.278.843,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.983.846.000,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.260.250.000,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.275.000.000,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.985.250.000,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.098.396.000,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.433.296.000,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.665.100.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.625.200.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.625.200.000,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.611.200.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	91.200.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	91.200.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	91.200.000,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	120.000.000,00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.400.000.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.400.000.000,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.400.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	262.174.109.181,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.320.000.000,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	6.320.000.000,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	2.990.000.000,00
5.2.01.01.01.0001.	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00
5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.340.000.000,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	600.000.000,00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	3.330.000.000,00
5.2.01.01.03.0001.	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	610.000.000,00
5.2.01.01.03.0003.	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.500.000.000,00
5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	90.000.000,00
5.2.01.01.03.0009.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	200.000.000,00
5.2.01.01.03.0012.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	570.000.000,00
5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	360.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.921.771.692,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	53.230.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	53.230.000,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00
5.2.02.01.03.0012.	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	32.500.000,00
5.2.02.01.03.0014.	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	6.000.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	9.230.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	9.756.500.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	986.500.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	287.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	699.500.000,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.000.000,00
5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	8.750.000.000,00
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.750.000.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	467.255.884,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	212.547.288,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	212.547.288,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	160.133.596,00
5.2.02.03.02.0011.	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.000.000,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	159.133.596,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	94.575.000,00
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	40.000.000,00
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	8.000.000,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	46.575.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	527.750.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	527.750.000,00
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.750.000,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	526.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.059.649.275,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	799.213.590,00
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.500.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	244.500.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	552.213.590,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.981.015.685,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	2.429.730.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	729.400.000,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.500.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	760.685.685,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	29.700.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.279.420.000,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	587.000.000,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	25.000.000,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	242.800.000,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	213.400.000,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8.500.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	70.000.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	132.720.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.336.308.900,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.245.808.900,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	259.028.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	541.649.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	9.231.900,00
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	140.900.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	295.000.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	90.500.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	75.500.000,00
5.2.02.06.02.0004.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.450.775.810,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.114.775.810,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.679.857.700,00
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	434.918.110,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.336.000.000,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.336.000.000,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	148.578.200,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.000.000,00
5.2.02.08.01.0031.	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	6.000.000,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	7.000.000,00
5.2.02.08.04.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	42.380.000,00
5.2.02.08.04.0005.	Belanja Modal System/Power Supply	42.380.000,00
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7.000.000,00
5.2.02.08.05.0004.	Meteorological Equipment	7.000.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	86.198.200,00
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	86.198.200,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	8.668.218.830,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	6.434.900.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	5.587.270.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	847.630.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.233.318.830,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	905.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.326.132.330,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	13.200.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	893.081.500,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	119.500.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	119.500.000,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	119.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.000.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	26.000.000,00
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	12.000.000,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	14.000.000,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	5.000.000,00
5.2.02.15.03.0002.	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	5.000.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.070.480.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	157.500.000,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	157.500.000,00
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	912.980.000,00
5.2.02.18.03.0001.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	812.980.000,00
5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	215.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	215.000.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.000.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	200.000.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.517.524.793,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.517.524.793,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.517.524.793,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.570.630.465,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.938.630.465,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.738.630.465,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.408.292.000,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	215.000.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.870.781.825,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	315.000.000,00
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	294.200.000,00
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.344.425.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.652.490.550,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.472.741.090,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	130.600.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	35.100.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00
5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.632.000.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.632.000.000,00
5.2.03.04.01.0001.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	28.000.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.594.000.000,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	10.000.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.871.688.950,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.944.683.950,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	101.558.443.950,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	63.079.438.226,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	34.824.005.724,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.655.000.000,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	5.386.240.000,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.634.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.01.02.0005.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	750.000.000,00
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.002.000.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	13.559.865.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.242.365.000,00
5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.242.365.000,00
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	11.356.500.000,00
5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	11.356.500.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	961.000.000,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	95.000.000,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	866.000.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	15.586.060.000,00
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.920.000.000,00
5.2.04.03.02.0001.	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.920.000.000,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	650.000.000,00
5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	650.000.000,00
5.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	300.000.000,00
5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	300.000.000,00
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.000.000.000,00
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.000.000.000,00
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	8.716.060.000,00
5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	8.716.060.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	7.781.080.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.381.080.000,00
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	7.381.080.000,00
5.2.04.04.04.	Belanja Modal Jaringan Gas	400.000.000,00
5.2.04.04.04.0002.	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	400.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.018.074,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	488.518.074,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	488.518.074,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	488.518.074,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	114.606.645.400,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.377.665.000,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.314.875.000,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.314.875.000,00
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.314.875.000,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	62.790.000,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	62.790.000,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	62.790.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	113.228.980.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.228.980.400,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.508.176.400,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.508.176.400,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	51.720.804.000,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	51.720.804.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.000.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	10.000.000.000,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	10.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000.000,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Ranai, 30 Desember 2022

BURATINATUNA,

